

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan mendasar sebagai titik awal munculnya gagasan *corporate governance* berasal dari konsekuensi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian korporasi (Lukviarman, 2016). Secara umum, munculnya *corporate governance* dilatarbelakangi dari berbagai skandal besar yang terjadi di perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an dikarenakan tindakan yang cenderung serakah dan mementingkan tujuan pihak-pihak tertentu saja. Salah satu skandal besar yang pernah terjadi adalah kasus Enron yang mulai terungkap pada tahun 2001, dimana Enron memanipulasi laporan keuangan dengan melakukan *mark-up* laba padahal mengalami kerugian. Hal tersebut dilakukan karena keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor (Fuadramadan, 2014). Kasus tersebut terjadi juga tidak terlepas dari pertentangan kepentingan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif atau kepentingan bersama dari organisasi sehingga kinerja perusahaan menjadi tidak efektif. Hal tersebut menjadi pemicu dari kebutuhan akan *corporate governance* (Faith, 2013). *Corporate governance* diharapkan dapat memberikan dampak kepada perusahaan dengan rangkaian proses tertentu, kebijakan serta aturan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan agar dapat meminimalisir adanya konflik keagenan atau benturan kepentingan dari dewan direksi (manajemen). Konflik keagenan timbul karena adanya *agency theory* yaitu hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen selaku agen yang dikontrak oleh pemegang saham untuk berkerja demi kepentingan pemegang saham.

Berbagai isu yang berhubungan dengan *governance* (khususnya CG) menjadi populer di Indonesia, baik secara konseptual maupun praktikal, setelah krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 (Lukviarman, 2016). Keberadaannya memiliki

implikasi yang luas dan kritikal terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan (RUPS, dewan komisaris, dan direksi) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku (Maretha dan Purwaningsih, 2013). Dalam perkembangannya, *Corporate Governance* (CG) dianggap sebagai bidang ilmu multidisiplin serta keberadaannya muncul dalam tataran strategis dalam setiap organisasi karena adanya perubahan lingkungan yang juga mempengaruhi perilaku organisasi.

*Corporate Governance* memiliki mekanisme yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu internal dan eksternal (Lukviarman, 2016:61). Mekanisme internal adalah cara bagaimana mengendalikan perusahaan dengan struktur dan proses internal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan komisaris dan dewan direksi, sedangkan mekanisme eksternal merupakan fungsi kontrol yang beroperasi melalui kompetisi pasar sebagai bagian dari perangkat *governance* di dalam mendisiplinkan perilaku manajemen. Mekanisme pengendalian internal memiliki dua struktur kepengurusan yaitu *one tier system* dan *two tier system*. Struktur kepengurusan perusahaan yang diterapkan di Indonesia ialah *two tier system* dimana perusahaan mempunyai dua badan yang terpisah yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris bertugas sebagai pengawas atas tugas-tugas yang dilakukan oleh dewan direksi, kemudian dewan direksi bertanggungjawab mewakili dan mengelola perusahaan dibawah pengarahan dewan komisaris (Lukviarman, 2016:61). Mekanisme *corporate governance* lainnya yaitu komite audit, dimana komite audit merupakan sekumpulan anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris dan minimal satu orang memiliki kemampuan di bidang akuntansi, yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*).

Pengawasan komite audit mendorong pelaksanaan GCG yang efektif. Pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip GCG dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan dan kemudian melakukan pelaporan. Semakin banyak intensitas komite audit melakukan rapat, maka akan semakin banyak pula intensitas para anggota komite audit dalam bertukar pikiran dan pengetahuan mengenai keputusan yang harus diambil demi kepentingan seluruh *stakeholder*, dimana salah satunya adalah keputusan mengenai pengungkapan sosial perusahaan dalam *sustainability report*. Dengan adanya *sustainability report*, kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan akan semakin meningkat. Masyarakat saat ini sudah semakin peduli terhadap produk yang ramah lingkungan dan juga berdampak positif bagi perusahaan terutama bagi kinerja keuangannya. Hal tersebut juga dapat menjadi indikasi yang penting bagi investor karena dapat digunakan sebagai alasan apakah mereka akan mempertahankan investasi di perusahaan tersebut (Ariyani dan Gunawan, 2014; dalam Djamilah dan Surenggono, 2017).

Komite audit memiliki ketua yaitu seorang komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Amri, 2011). Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan (Ratnasari, 2011; dalam Putri, 2013). Semakin besar persentase komisaris independen, maka akan meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kualitas pengungkapan dan mengurangi usaha menutupi informasi

perusahaan (Prasojo, 2011; dalam Putri, 2013). Berfungsinya tiap mekanisme ini diduga akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Dewan komisaris adalah wakil *shareholder* yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) serta bertanggung jawab agar manajemen memenuhi tanggung jawabnya dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi di antara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, dewan komisaris akan membahas mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah mengenai benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat diharapkan *monitoring* (pengawasan) akan semakin baik dan mendorong perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi sosial, sehingga pengungkapan informasi sosial perusahaan juga akan semakin luas. Dengan demikian semakin banyak rapat yang dilakukan dewan komisaris maka akan semakin luas pengungkapan informasi sosial yang diungkapkan dalam *sustainability report* dan akan berdampak positif bagi kinerja keuangan perusahaan (Adhipradana dan Daljono, 2014).

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan atas saham perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka manajemen semakin produktif dan memaksimalkan nilai serta *image* perusahaan dengan cara melakukan pengungkapan sukarela yang berisi informasi sosial. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela berupa *sustainability report* untuk mendapatkan legitimasi yang besar pula sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan (Adhipradana dan Daljono, 2014).

*Global Reporting Initiative* (GRI) dalam versi G3.1 (2011) dari Pedoman Pelaporan Keberlanjutan mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai praktik

mengukur, mengungkapkan, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Adhipradana dan Daljono (2014) menyatakan bahwa pelaporan keberlanjutan atau *sustainability report* adalah istilah luas yang dianggap sinonim dengan yang lain yang digunakan untuk mendeskripsikan pelaporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya, *triple bottom line*, pelaporan tanggung jawab perusahaan, dan sebagainya).

Di Indonesia, *sustainability report* masih bersifat *voluntary* dan dalam tahap pengenalan dimana masih sedikit perusahaan yang tertarik untuk mengungkapkan *sustainability report*. Walaupun setiap tahun jumlah perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* semakin bertambah, namun tidak sebanding dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia (Adhipradana dan Daljono, 2014). Meskipun pengungkapan *sustainability report* tidak diwajibkan untuk perusahaan, akan tetapi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik (*good corporate governance*) mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela, seperti pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan (Utama, 2006; dalam Nasir, Ilham, dan Utara, 2014).

Perusahaan yang memiliki *sustainability* yang baik adalah perusahaan yang mampu meningkatkan pendapatannya secara terus menerus dari waktu ke waktu, dimana konsep tersebut mengartikan *sustainability* secara sempit dalam segi kinerja keuangan (Nofianto dan Agustina, 2014). Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan berarti perusahaan dapat mencapai tujuan dari berdirinya perusahaan tersebut (Like, 2012). Selain itu, kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang mendapatkan perhatian oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah salah satu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Dalam hubungannya dengan kinerja,

laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan (Santoso, 2017).

Hasil penelitian Tarigan dan Samuel (2014) menyimpulkan bahwa dimensi ekonomi (EC) dari *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dua dimensi lainnya yaitu lingkungan (EN) dan sosial (SO) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Nofianto dan Agustina (2014) menunjukkan bahwa *economic performance disclosure*, *social performance disclosure*, dan *environmental performance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan baik secara parsial maupun simultan.

Hasil penelitian tentang CG yang dilakukan Adhipradana dan Daljono (2014) menunjukkan bahwa variabel total aset, total karyawan, dan *governance committee* berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang mengungkapkan *sustainability reporting*, sedangkan variabel profitabilitas, likuiditas, rasio pembayaran dividen, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil penelitian dari Wardhani dan Zulkifli (2017) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, atau bisa disimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten ke kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menduga adanya variabel mediasi di antara variabel CG dan kinerja keuangan.

Penelitian ini ingin melihat apakah *sustainability reporting* memediasi pengaruh CG (yang mencakup komite audit, komisaris independen, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial) ke kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan mekanisme *good corporate governance*, perusahaan dituntut tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi dari kegiatannya tapi juga nilai tambah lain, keseimbangan kepentingan *stakeholders*, dan kepatuhan terhadap

peraturan serta norma yang berlaku atas kegiatan yang dilakukan. Penerapan *corporate governance* yang baik berbanding lurus dengan pengungkapan tindakan-tindakan perusahaan yang berdampak ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan kata lain, hubungan antara *good corporate governance* dan *sustainability report* yang berbanding lurus, artinya perusahaan siap menghadapi tantangan lingkungan dan sosial di masa mendatang seperti pemanasan global, kepedulian kesehatan, dan kepedulian terhadap kemiskinan dan berkontribusi secara nyata dalam mengatasi permasalahan tersebut maka perusahaan akan memiliki kinerja keuangan yang baik (Nofianto dan Agustina, 2014). Pengungkapan *sustainability report* memiliki kaitan terhadap kinerja keuangan yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu investor dan konsumen. Pengungkapan *sustainability report* dapat memberikan informasi tambahan bagi investor, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan alasan bagi investor apakah tetap mempertahankan investasi di perusahaan tersebut, atau memberikan informasi bagi calon investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Investasi yang diperoleh dari investor merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan *sustainability report* dari sudut pandang konsumen dapat meningkatkan legitimasi perusahaan, sehingga konsumen tertarik dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal tersebut akan meningkatkan penjualan perusahaan dan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dalam perusahaan perbankan berbeda dengan kinerja perusahaan non-perbankan, oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan ROA, ROE dan PBV sebagai pengukuran variabel eksogen. Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, menyebutkan bahwa tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari *Return on Asset (ROA)* yang mewakili pengukuran untuk aspek laba perusahaan atau rentabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Wardiah, 2013; dalam Djamilah dan Surenggono, 2017). ROE adalah ukuran

profitabilitas perusahaan yang mengukur pengembalian untuk pemegang saham karena semakin besar ROE yang dihasilkan, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemegang saham (Fachrudin, 2011; dalam Djamilah dan Surenggono, 2017).

Penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* (yang mencakup komite audit, komisaris independen, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial) terhadap kinerja keuangan melalui *sustainability reporting* sebagai wujud dari pengungkapan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2017. Pemilihan obyek perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan alasan karena isu *corporate governance* menjadi lebih populer setelah lembaga keuangan multilateral seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) mengungkapkan bahwa krisis keuangan yang melanda berbagai negara di Asia, antara lain disebabkan oleh buruknya pelaksanaan *Corporate Governance* (ADB, 2000; dalam Lukviarman 2016). Selain hal tersebut, *sustainability report* sendiri banyak dipublikasikan oleh perusahaan perbankan menurut *sustainable finance* OJK.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2017?
2. Apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui *sustainability reporting* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2017?



### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2017.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan melalui *sustainability reporting* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2017.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik dan manfaat secara praktik sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk penelitian dengan topik serupa di masa mendatang serta menjadi bukti empiris tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan *sustainability report* sebagai variabel pemediasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

#### 2. Manfaat Praktik

##### a. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik berupa informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan investasi saham, terutama dalam menilai dan mempertimbangkan tentang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam investasi, serta dapat memberikan informasi mengenai dampak pelaksanaan *good corporate governance*

terhadap kinerja keuangan melalui *sustainability report* sehingga perusahaan dapat menyajikan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar atau eksternal.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu pemikiran tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan yang disebut *sustainability reporting* serta pentingnya pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab dengan penjelasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama menguraikan mengenai latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua menguraikan mengenai tujuan pustaka yang terkait dengan topik penelitian yang mencakup landasan teori mencakup teori agensi, teori legitimasi, *sustainability reporting*, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan. Dalam bab ini juga memaparkan tentang tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ketiga menguraikan mengenai populasi dan sampel dari penelitian, data yang diperoleh dan sumber data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat membahas mengenai hasil dari penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab kelima membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada selama melakukan penelitian, dan saran yang akan diberikan untuk penelitian selanjutnya.